

LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 TINGKAT UAKPA

**KANWIL DJKN KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarbaru, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	60

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
JL. A. YANI KM 29,5 BANJARBARU – KALIMANTAN SELATAN 70721
TELP. (0511) 4780787 FAX. (0511) 4784399
e-mail : kanwildjknkalselteng@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan *Audited* TA 2025 Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, 04 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Tahunan *Audited* TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.243.006.898 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 674.293.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 2.842.799.132 atau mencapai 79,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.587.758.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 29.698.225.882 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp16.323.670 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp 29.681.902.202. Tidak ada Piutang Jangka Panjang.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.440.500 dan Rp 29.696.785.382.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3,897,413,548 sedangkan

jumlah beban adalah sebesar Rp 3.048.414.150 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 848.999.398. Surplus Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp 269.176.000 dan tidak ada defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.118.175.398.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 29.825.813.753 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 1.118.175.398 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.247.203.769 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 29.696.785.382.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan Tahunan Audited TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	674,293,000	4,243,006,898	629.25%	2,688,112,131
JUMLAH PENDAPATAN		674,293,000	4,243,006,898	629.25%	2,688,112,131
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	3,041,420,000	2,453,632,733	80.67%	2,757,437,083
Belanja Modal	B.5	546,338,000	389,166,399	71.23%	3,663,159,900
JUMLAH BELANJA		3,587,758,000	2,842,799,132	79.24%	6,420,596,983

II. NERACA

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	76,417,350
Persediaan	C.10	16,323,670	-
Jumlah Aset Lancar		16,323,670	76,417,350
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	20,219,436,000	20,219,436,000
Peralatan dan Mesin	C.15	5,753,320,038	6,023,935,967
Gedung dan Bangunan	C.16	9,323,441,954	9,323,441,954
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5,614,295,780)	(5,801,425,871)
Jumlah Aset Tetap		29,681,902,212	29,765,388,050
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	800,693,628	446,804,500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(800,693,628)	(446,804,500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		29,698,225,882	29,841,805,400
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	1,440,500	15,991,647
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,440,500	15,991,647
JUMLAH KEWAJIBAN		1,440,500	15,991,647
EKUITAS	C.29		
Ekuitas Dana Lancar		-	-
Ekuitas Dana Investasi		-	-
Ekuitas		29,696,785,382	29,825,813,753
JUMLAH EKUITAS DANA		29,696,785,382	29,825,813,753
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29,698,225,882	29,841,805,400

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN		3.897.413.548	2.764.529.481
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	24.630.830	52.154.235
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.371.473.295	1.558.528.043
Beban Pemeliharaan	D.5	608.451.647	520.926.646
Beban Perjalanan Dinas	D.6	432.136.791	626.275.911
Beban Barang untuk	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	611.721.587	580.710.698
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3.048.414.150	3.338.595.533
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		848.999.398	(574.066.052)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		269.176.000	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		269.176.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.118.175.398	(574.066.052)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		1.118.175.398	(574.066.052)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	29.825.813.753	26.620.538.703
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.118.175.398	(574.066.052)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.7	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.8	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(1.247.203.769)	3.779.341.102
EKUITAS AKHIR	E.8	29.696.785.382	29.825.813.753

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berkedudukan di Jalan A. Yani KM 29,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Lain dari pada itu visi dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah yang bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan Teknis meliputi dibidang-bidang dan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- Bidang Kekayaan Negara meliputi : melaksanakan koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Keyaan Negara, penatausahaan Satuan Kerja Pengguna Barang, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, mengoptimalkan penggunaan, pengamanan/

pemeliharaan, penatausahaan Kekayaan Negara; hingga kebijakan.

- Bidang Piutang Negara, meliputi : mengoptimalkan pelayanan pengelolaan Piutang negara, melaksanakan koordinasi dengan para penyerah piutang;
- Bidang Lelang, meliputi : optimalisasi pelayanan lelang, sosialisasi dan koordinasi dengan pemohon lelang.
- Bidang Hukum dan Informasi, meliputi : optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penanganan/pengiriman laporan dan penanganan perkara perdata/TUN di lembaga peradilan.
- Bagian Umum, meliputi : memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan kedinasan dan non kedinasan, kesempatan menduduki jabatan struktural, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan pendidikan, optimalisasi penyusunan Rencana Anggaran, pengawasan pelaksanaan Anggaran Belanja dan administrasi perkantoran.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus, pengakuan pendapatan-LO pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan

investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh

penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2020 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	674,293,000	4,243,006,898
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja	-	-
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	3,041,420,000	3,041,420,000
Belanja Modal	546,338,000	546,338,000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	3,587,758,000	3,587,758,000

Realisasi

Pendapatan

Rp4.243.006.898

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.243.006.898 atau mencapai 77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp674.293.000. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	674,293,000	3,973,339,561	589%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	-	-	0%
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	269,176,000	100%
Pendapatan Jasa Lainnya	-	330,000	100%
Pendapatan Denda Lainnya	-	161,337	100%
Jumlah	674,293,000	4,243,006,898	629%

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan 57,84 persen dibandingkan TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024
belum*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.243.006.898	2.688.112.131	57,84
Jumlah	4.243.006.898	2.688.112.131	57,84

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

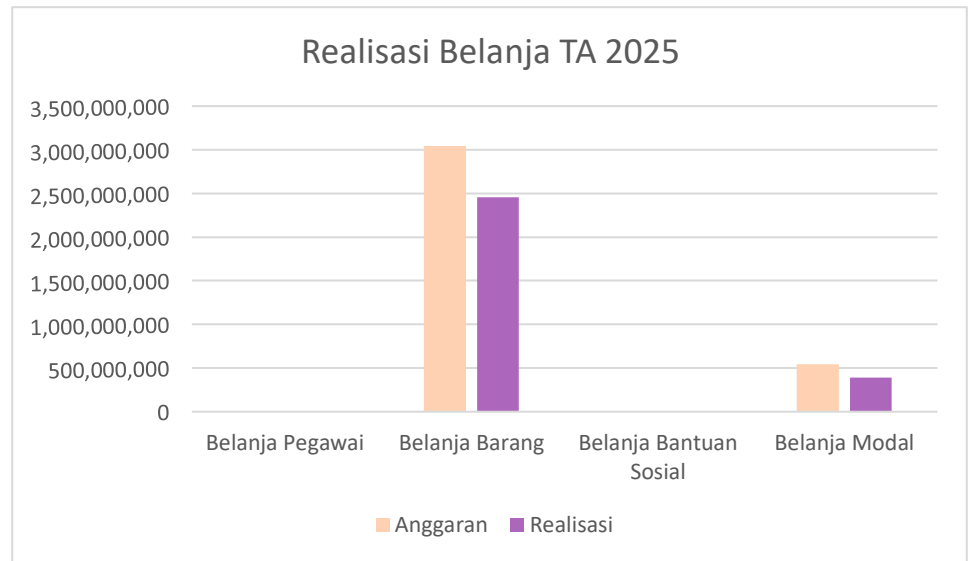
Rp2.842.799.132

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.842.799.132 atau 96,37% dari anggaran belanja sebesar Rp3.587.758.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.041.420.000	2.453.632.733	80,67
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	546.338.000	389.166.399	71,23
Total Belanja Kotor	3.587.758.000	2.842.799.132	79,24
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	3.587.758.000	2.842.799.132	79,24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: sudah



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 56% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja barang akibat efisiensi dan blokir anggaran serta tidak adanya belanja modal gedung bangunan pada TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2,453,632,733	2,757,437,083	-11%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	389,166,399	3,663,159,900	-89%
Total Belanja Kotor	2,842,799,132	6,420,596,983	-56%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2,842,799,132	6,420,596,983	-56%

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan

kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai telah tersentralisasi di Kantor Pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp2.453.632.733

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.453.632.733 dan Rp2.757.437.083. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 11% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, dan belanja perjalanan dinas dalam negeri akibat adanya blokir anggaran pada TA 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,026,522,919	915,666,683	12.11
Belanja Barang Non Operasional	293,107,876	417,794,532	(29.84)
Belanja Barang Persediaan	40,954,500	52,154,235	(21.47)
Belanja Jasa	52,459,000	224,619,076	(76.65)
Belanja Pemeliharaan	608,451,647	520,926,646	16.80
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	432,136,791	626,275,911	(31.00)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,453,632,733	2,757,437,083	(11.02)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,453,632,733	2,757,437,083	(11.02)

Belanja Modal
Rp389.166.399

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 389.166.399 dan Rp3.663.159.900. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tidak adanya belanja modal Gedung Bangunan pada TA 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389,166,399	671,194,700	(72.47)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2,991,965,200	1.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	389,166,399	3,663,159,900	(841.28)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	389,166,399	3,663,159,900	-841.28

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Bahwa tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah baik TA 2025 maupun TA 2024. Hal ini disebabkan belum dibutuhkan Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp 389.166.399 mengalami penurunan sebesar 72,47% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp671.194.700.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	389,166,389	355,194,700	8.73
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	100.00
Kendaraan Bermotor	0	316,000,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	389,166,389	671,194,700	-72.47
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	389,166,389	671,194,700	-72.47

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebesar Rp 0, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.991.965.200.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		2,991,965,200
Jumlah Belanja Kotor	0	2,991,965,200
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	0	2,991,965,200

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan baik TA 2025 maupun TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya baik TA 2025 maupun TA 2024.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial baik TA 2025 maupun TA 2024. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2025	2024
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
Pembulatan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	2025	2024
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	2025	2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB
P0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar P0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	2025	2024
Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
P0

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar P0 dan P0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak

tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	-	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0 **C.8 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	2025	2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0 **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 Rp0 dan 2024 adalah sebesar Rp Rp76.417.350.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2025 dan 2024*

Nama	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas II	0 -	76.417.350
Jumlah	-	76.417.350

*Persediaan Rp
16.323.670*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16.323.670 dan Rp 0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	2025	2024
Barang Konsumsi	16.323.670	-
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp20.219.436.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 20.219.436.000 dan Rp 20.219.436.000. Mutasi nilai tanah tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	20.219.436.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	20.219.436.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.748 m2	Jalan A. Yani Km.29,5 Banjarbaru	19.323.936.000
2	597 m2	Perumahan Karang Anyar Residence 1, Jalan Karang Sawo, Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara	895.500.000
Jumlah			20.219.436.000

Tanah seluas 2.748 m2 yang terletak di Jalan A. Yani Km. 29,5 Banjarbaru, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan sendiri. Sedangkan, tanah seluas 597 m2 yang terletak di Perumahan Karang Anyar Residence 1,

Jalan Karang Sawo, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara saat ini belum ditetapkan status penggunaanya.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp 5.753.320.038

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 5.753.320.038 dan Rp 6.023.935.967. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	6,023,935,967
Mutasi tambah:	
Pembelian	389,166,399
Perolehan Lainnya	5,108,000
Transfer Masuk	140,911,300
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(5,108,000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(800,693,628)
Saldo per 31 Desember 2025	5,753,320,038
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-4,342,248,804
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,411,071,234

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan*

Rp9.323.441.954

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 9.323.441.954 dan Rp 9.323.441.954. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	9.323.441.954
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Reklasifikasi Masuk	
Koreksi kurang	
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	9.323.441.954
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-1.272.046.976
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.051.394.978

Tidak ada transaksi mutasi pada gedung dan bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Tidak ada Mutasi pada Jalan, Irigasi dan Jaringan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan bangunan Gedung lainnya (Gedung Kantor Lainnya, Gedung Pos Jaga Permanen, dan Bangunan Tempat Parkir).

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp6.248.230.371*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp6.248.230.371 dan Rp6.028.135.667. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,753,441,954	-4,342,248,804	1,411,193,150
2	Gedung dan Bangunan	9,323,441,954	-1,272,046,976	8,051,394,978
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0
4	Aset Tetap Lainnya	800,693,628	-800,693,628	0
Akumulasi Penyusutan		15,877,577,536	-6,414,989,408	9,462,588,128

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Aset Tak Berwujud	-	-
Jumlah		-	-

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2025	
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	
Mutasi tambah:	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Software komputer	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN

Keterangan	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Jumlah	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 1.440.500

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.440.500 dan Rp 15.991.647. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Kode Akun	Uraian	2025	2024
212112	Utang Kepada Pihak Ketiga	1,440,500	15,991,647
212191	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-
Total		1,440,500	15,991,647

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	2025	2024
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Total	-	-

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.27 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2025. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNB	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Pendapatan Diterima di Muka	-
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.440.500 dan Rp 15.991.647, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar

Uraian	Jumlah
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,440,500
Total	1,440,500

Ekuitas

Ekuitas

Rp29.696.785.382

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 29.696.785.382 dan Rp 29.825.813.753. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp
3.897.413.548

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.897.413.548 dan Rp2.764.529.481 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

Aset Tetap	Tahun 2025	Tahun 2024	NAIK (TURUN)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	3.897.413.548	2.764.529.481	41%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	-	-	0%
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	0%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			
Jumlah	3.897.413.548	2.764.529.481	41%

Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebanyak 41% dari Tahun 2024. Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berasal dari Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan vakansi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	
Jumlah	0	0	

Beban

Persediaan

Rp24.630.830

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.630.830 dan Rp52.154.235. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	24.630.830	52.154.235	-53%
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah Beban Persediaan	24.630.830	52.154.235	-53%

Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 53% dari Bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh efisiensi dan blokir anggaran TA 2025.

Beban Barang

dan Jasa

Rp1.371.473.295

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.371.473.295 dan Rp 1.558.528.043. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	833,735,898	782,127,562	7%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	42,781,021	9,577,156	78%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	9,780,000	18,878,000	-48%
Beban Honor Operasional Satker	75,480,000	52,368,000	44%
Beban Barang Operasional Lainnya	64,375,000	52,500,000	23%
Beban Bahan	97,306,876	261,994,532	-63%
Beban Honor Output Kegiatan	195,801,000	155,800,000	26%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Langganan Listrik	14,328,000	178,426,189	-92%
Beban Langganan Telepone	-	13,814,854	-100%
Beban Langganan Air	-	11,211,250	-100%
Beban Sewa	27,410,000	8,830,500	-100%
Beban Jasa Profesi	9,000,000	13,000,000	-31%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,475,500	-	0%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	0%
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0%
Jumlah	1,371,473,295	1,558,528,043	-12%

Beban Barang dan Jasa TA 2025 mengalami penurunan 12% dari TA 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban pengiriman surat dinas pos surat, beban bahan, beban langganan listrik, beban langganan listrik, beban jasa profesi, dan tidak adanya beban langganan telepon dan beban langganan air.

Beban

Pemeliharaan

Rp608.451.647

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp608.451.647 dan Rp520.926.646. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263.125.308	263.393.214	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	345.326.339	257.533.432	34%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	0%
Jumlah	608.451.647	520.926.646	17%

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 17% dari Bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban

Perjalanan

Dinas Rp

432.136.791

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 432.136.791 dan Rp 626.275.911. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	420.742.791	608.475.911	-31%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.394.000	17.800.000	-36%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0%
Jumlah	432.136.791	626.275.911	-31%

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan -31% dari Bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban perjalanan dinas biasa.

Beban Barang

untuk

Diserahkan

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 611.721.587

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 611.721.587 dan Rp 580.710.698.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	422.155.425	412.109.188	2%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	189.566.162	168.601.510	12%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-100%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	0%
Jumlah Penyusutan	611.721.587	580.710.698	5%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0%
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0%
Jumlah Amortisasi	-	-	0%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	611.721.587	580.710.698	5%

Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 5% dari Bulan Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban penyusutan peralatan dan mesin.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 269.176.000

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
S/D Pelepasan Aset Non Lancar	269,176,000	0	1.00
S/D Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	-
S/D Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	269,176,000	0	100%

Pada TA 2025 terdapat surplus pelepasan aset non lancar berupa pendapatan penjualan peralatan dan mesin

Pos Luar Biasa Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp29.825.813.753

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 29.825.813.753 dan Rp 26.620.538.703.

Surplus LO

Rp1.118.175.398

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 1.118.175.398 dan Tahun 2024 Defisit Rp 574.066.052. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/ Kesa

lahan Mendasar

Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp0*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain **E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar

Entitas (Rp

1.247.203.769)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp 1.247.203.769) dan Rp 3.779.341.102. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4,243,006,898)
Ditagikan ke Entitas Lain	2,842,799,132
Transfer Masuk	139,069,350
Transfer Keluar	13,934,647
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(1,247,203,769)

Diterima dari

Entitas Lain

(DDEL)

(4.243.006.898)/

Ditagikan ke

Entitas Lain

(DKEL)

Rp2.842.799.132

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (4.243.006.898) sedangkan DKEL sebesar Rp2.842.799.132.

Transfer Masuk

Rp139.069.350

Transfer Keluar

Rp 13.934.647

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

No	Jenis	Nilai
1	Transfer Masuk	139,069,350
2	Transfer Keluar	13,934,647
Jumlah		153,003,997

*Pengesahan
Hibah Langsung
dan
Pengembalian
Pengesahan
Hibah Langsung
Rp0*

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Rp 29.696.785.382 adalah masing-masing sebesar Rp 29.696.785.382 Rp
29.825.813.753.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

Tidak ada

F.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah :

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Martapura A/C 6500-95-063-271-00-0 a.n. BPG 045 KANWIL DJKN KALSELTENG
- PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarbaru A/C 031-00-1443391-9 a.n RPL 045 PS KANWIL DJKN KALSELTENG

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.4.1 Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor: KEP-6/WKN.12/2025 tanggal 09 Januari 2025 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Tetik Fajar Ruwandari
Pejabat Pembuat Komitmen	: Eny Susanti
Pejabat Penandatanganan SPM	: Ahmad Endang D Hidayat
Bendahara Pengeluaran	: Astrid Dita Nafilah.

Daftar Tabel Dalam Penyajian Laporan Keuangan

Tabel Laporan Realisasi Anggaran

Tabel Neraca

Tabel Laporan Operasional

Tabel Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel Penghitungan Penyisihan Piutang

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Tabel Rincian Pendapatan dan Belanja

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Tabel Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA
2025 dan 2024

Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Tabel Rincian Piutang PNPB

Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

Tabel Rincian Bagian Lancar TPA

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Tabel Rincian Belanja Di Bayar di Muka

Tabel Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

Tabel Rincian Tagihan TPA

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang TA 2025

Tabel Rincian Tanah

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel Rincian Aset Tak Berwujud

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tabel Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Tabel Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan

Tabel Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Tabel Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan 2024

Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

Tabel Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Tabel Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Tabel Rincian Koreksi Lain-lain

Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas

Tabel Rincian Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tabel Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung